

**STRATEGI PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD) DALAM
MENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA
PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)



Oleh

TAIYIMAH
NIM. 10625003961

PROGRAM S1

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2010**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.”**

Salah satu program yang di sediakan oleh pemerintah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Desa adalah melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD). Adapun yang menjadi latar belakang penulis mengambil judul ini yaitu karena ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah, bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah, dan bagaimana strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah menurut tinjauan Ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di desa Padang Sawah kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Yang menjadi populasi dan sampel adalah seluruh pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang berjumlah 12 orang, dan masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang berjumlah 90 orang. Data tersebut penulis peroleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan angket. Sedangkan metode penulisan data adalah dengan menggunakan metode deduktif, induktif.

Dari hasil penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan oleh Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah dengan cara mensosialisasikan dan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat bagi masyarakat yang mengembangkan usaha ekonominya. Pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) di desa Padang Sawah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat telah terlaksana sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan progam telah membantu masyarakat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di desa Padang Sawah. Strategi yang dilakukan oleh Program Pemberdayaan Desa (PPD) di desa Padang Sawah telah sesuai dengan ekonomi islam yaitu yang bertujuan untuk mensejahterakan dan membantu masyarakat dalam bidang perekonomian.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABELv

BAB I : PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang Masalah1

B. Batasan Masalah6

C. Rumusan Masalah6

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....7

E. Metode Penelitian8

F. Sistematika Penulisan11

BAB II : TINJAUAN UMUM DESA PADANG SAWAH KECAMATAN

KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR.....13

A. Keadaan Geografis13

B. Keadaan Penduduk14

C. Pendidikan Penduduk16

D. Mata Pencarian Penduduk18

E. Agama dan Budaya Masyarakat20

| | |
|---|-----------|
| BAB III : TINJAUAN TEOROTIS TENTANG PROGRAM | |
| PEMBERDAYAAN DESA (PPD) DALAM MENGEMBANGKAN | |
| EKONOMI MASYARAKAT..... | 23 |
| A. Pengertian Program Pemberdayaan Desa..... | 23 |
| B. Dasar Hukum Program Pemberdaayan Desa | 24 |
| C. Bentuk-Bentuk Program Pemberdayaan Desa | 24 |
| D. Tujuan Program Pemberdayaan Desa | 34 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 36 |
| A. Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam | |
| Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Desa Padang Sawah | 36 |
| B. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam | |
| Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Desa Padang Sawah | 48 |
| C. Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam | |
| Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Menurut Tinjauan | |
| Ekonomi Islam..... | 55 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... | 58 |
| A. Kesimpulan..... | 58 |
| B. Saran | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep *al-falah* (Kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai Khalifah di muka bumi ini di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukkan untuk manusia.¹ Pengembangan setiap disiplin ilmu yang utamanya bertumpu pada objek manusia sangat dipengaruhi oleh konsep dasar manusia.²

Manusia merupakan elemen hidup dan pokok dari setiap program pembangunan. Mereka adalah tujuan sekaligus sebagai sasaran pembangunan, dan apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, dan kepentingan dirinya tidak dilindungi dalam batas-batas kesejahteraan sosial, tidak mungkin akan berhasil mengaktualisasikan tujuan-tujuan pokok Islam dalam pembangunan.³

Pembangunan ekonomi seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat berdasarkan azas demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan yang melekat, serta mampu memberikan kesempatan yang

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), Ed. 1. Cet. Ke-2, h. 9

²M. Sholahuddin, *Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 1. h. 2

³ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insana Press, 2000), Cet. Ke-1, h. 85-86

seluas-luasnya kepada semua pelaku ekonomi untuk berperan sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.⁴

Dimensi sistem dan kelembagaan ekonomi, tidak hanya ekonomi positif (positive economic), tetapi juga ekonomi normatif (normative economic). Di dalamnya, tidak hanya terkait dengan bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi pada sisi ekonomi positif, tetapi juga harus ada substansi keadilan dalam dimensi ekonomi normatifnya. Tanpa keseimbangan antara dua dimensi dan substansi tersebut, sistem ekonomi akan rapuh dari dalam dan akhirnya ambruk, seperti yang terlihat sekarang.⁵

Persaingan bebas dalam kondisi ekonomi rakyat sekarang tidaklah seimbang, dan karenanya tidak wajar dan tidak adil. Selama ini saja, lapisan ekonomi untuk rakyat yang diartikan sebagai usaha kecil masih lemah dan kurang tangguh untuk menghadapi dan memperoleh mamfaat dari ekonomi yang terbuka. Tanpa ada usaha yang terarah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran hanya akan meliputi lapisan rakyat banyak ini, dan akan dinikmati hanya sedikit oleh orang. Inilah tantangan yang harus dijawab,

⁴Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru : Unri Press, 2004), Cet. Ke-1, h. 101

⁵ Didik J.Rachbini, *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), Cet. Ke-1, h. 194-195

yang tidak bisa dihindari. Jawabannya adalah pemihakan nyata yang diwujudkan dalam langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi keterbelakangan dan memperkuat posisi daya saing ekonomi rakyat itu.

Pengembangan ekonomi rakyat tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan pada pertumbuhan. Untuk itu perlu upaya yang lebih kuat untuk mendorong percepatan perubahan struktural (structural transformasion) untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

Oleh karena itu, langkah yang amat mendasar yang harus ditempuh adalah membuka akses ekonomi rakyat kepada modal dengan demikian, tersedianya modal-modal kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya, dan melakukan pemupukan modal.⁶

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama pembangunan jangka panjang pertama, selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga telah menumbuh kembangkan usaha besar, usaha menengah, usah kecil, dan koperasi.⁷

⁶Ginandjar Karta Sasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan & Pemerataan*, (Jakarta : PT.Pustaka Cidesindo, 1996), Cet. Ke-1, h. 222

⁷ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2003), Cet. Ke-1, h. 36-37

Dalam perekonomian pendapatan merupakan faktor yang terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan maka kegiatan perekonomian dapat berjalan. Dalam artian ekonomi pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga, oleh sektor perusahaan yang dapat berupa gaji dan upah, sewa, bunga serta keuntungan/profit.⁸

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.⁹

Salah satu agenda utama Pembangunan Nasional sebagai mana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), serta dalam keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004 adalah menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat.

⁸Sukirno Sadono, *Pengantar Teori MakroEkonomi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-12, h. 91

⁹Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, (Pekanbaru : 2009), Cet. Ke-2, h. 2

Dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi maka perlu dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa/kelurahan guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Dana bantuan ini adalah Dana Usaha Desa/kelurahan yaitu salah satu dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) .Program Pemberdayaan Desa ini di selenggarakan oleh pemerintah Provinsi Riau yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya untuk di desa/kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang terdapat pada Bab IV Tentang Bidang Usaha Pasal 6, Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri telah direalisasikan, dengan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang berguna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi di desa Padang Sawah. Karena tujuan dari PPD adalah menanggulangi kemiskinan dengan mengembangkan ekonomi masyarakat dalam wadah lembaga-lembaga desa yang dikoordinasi dalam musyawarah desa.

Program Pemberdayaan Desa merupakan langkah pemerintah dibidang ekonomi dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, melalui pemberian Dana Usaha Desa yang berjumlah Rp.500.000.000,-. Dana ini

adalah dana bantuan dari pemerintah untuk desa dalam rangka menuju kemandirian desa yaitu untuk mengembangkan ekonomi masyarakat desa, yang mana dana tersebut dipinjamkan kepada masyarakat secara bergulir untuk menambah modal usaha masyarakat desa. Dari Program Pemberdayaan Desa ini kita akan mengetahui seberapa kemampuan PPD dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di desa Padang Sawah.

Dari latarbelakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“STRATEGI PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD) DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Strategi Program Pemberdayaan Desa Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat dalam bentuk usaha simpan pinjam di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar menurut tinjauan ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar menurut tinjauan ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran penulis untuk masyarakat pada umumnya dan untuk pemerintah pada khususnya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b. Sebagai hasil pengalaman penulis dalam mempraktekkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah.
- c. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berniat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, salah satu Desa yang memperoleh Dana Usaha Desa dari Program Pemberdayaan Desa (PPD), lokasi ini mudah dijangkau oleh penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan masyarakat yang mengembangkan ekonominya di Desa

Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang Strategi Program Pemberdayaan Desa dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus Program Pemberdayaan Desa yang berjumlah 12 orang yang terdiri dari : Otoritas yaitu Kepala Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Perempuan, Pengawas Umum yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengelola : Ketua, Kasir, Tata usaha, Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) I, Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) II, Tim Verifikasi (TV) I, Tim Verifikasi (TV) II, dan Tim Verifikasi (TV) III. Serta masyarakat desa yang memperoleh dana pinjaman untuk mengembangkan usahanya yang berjumlah 90 orang. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini penulis mengambil seluruh populasi yaitu dari pengurus Program Pemberdayaan Desa sebanyak 12 orang dan masyarakat yang memperoleh dana pinjaman berjumlah 90 orang.

4. Sumber Data

Penelitian ini ada dua data yang diperlukan yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh dari tempat lokasi penelitian melalui wawancara langsung yang disampaikan kepada pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan masyarakat yang mengembangkan ekonominya di Desa Padang Sawah.

2. Data Skunder

Yaitu data yang di peroleh dari Kantor UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Padang Sawah dan ditambah dengan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu cara pengumpulan data yang penulis peroleh dengan turun langsung kelapangan tempat penelitian yaitu di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b. Wawancara yaitu mengadakan wawancara kepada pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Padang Sawah yang ditujukan kepada Ketua Pengelola, Kasir, Tata usaha, Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tenaga Perempuan, Pengawas Umum, dan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), serta masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada UED-SP dari PPD sebanyak 5 orang dari 90 populasi.

- c. Angket yaitu dengan cara membuat pertanyaan yang berhubungan dengan keperluan penelitian yang diajukan kepada masyarakat yang memperoleh dana pinjaman.

6. Metode Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu analisa data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan ini menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

7. Metode Pembahasan

Metode Deduktif yaitu peneliti menggunakan kaidah-kaidah atau pendapat yang bersifat umum dan diambil kesimpulan secara khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya, penulisan proposal skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR

Bab ini berisikan tentang tinjauan umum daerah penelitian yang akan menjelaskan lokasi penelitian, Keadaan Geografis, Keadaan Penduduk, Pendidikan Sarana dan Prasarana serta Mata Pencaharian Penduduk.

BABIII: TINJAUAN TEORITIS TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD) DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT

Bab ini berisikan pengertian Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan tujuan Program Pemberdayaan Desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah, pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah dan

strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah menurut tinjauan ekonomi islam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

TINJAUAN UMUM DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR

A. Keadaan Geografis

Desa Padang Sawah ini merupakan desa yang telah ada sejak lama di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri dan di pinggir Sungai Subayang juga dapat merupakan sarana transportasi menuju desa tetangga, meskipun sudah memiliki jalan darat, disamping merupakan sumber daya perairan umum yang dapat dikembangkan Budi Daya ikan dalam keramba, lubuk larangan ikan maupun penangkapan (eksploitasi). Luas Desa Padang Sawah ± 25 KM², adapun jarak Desa Padang Sawah ini dari pusat Ibukota Kecamatan Kampar Kiri ± 19 Km.

Desa Padang Sawah mempunyai 4 Dusun yaitu, yang terdiri dari 8 RW 16 RT. Sedangkan mengenai batas wilayah Desa Padang Sawah adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Raja/Tanjung Mas
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Liti
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuntu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Domo¹

¹ Sumber data : Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tahun 2009

Sedangkan mengenai iklim Desa Padang Sawah tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya yaitu dengan iklim tropis.

B. Keadaan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk khususnya. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah.² Oleh karena itulah maka proses pembangunan penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa dengan demikian penduduk adalah investasi yang sangat menentukan terhadap kemajuan pembangunan. Untuk itu tingkat perkembangan sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Berdasarkan data statistik tahun 2009, jumlah penduduk Desa Padang Sawah sampai saat sekarang ini berjumlah 1.105 Jiwa dengan 304 KK (kepala keluarga). Untuk mengetahui kondisi penduduk Desa Padang Sawah dapat di lihat berdasarkan table di bawah ini:

² Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Ed. 1, Cet. Ke-5, h. 9

TABEL II.1
KONDISI PENDUDUK DESA PADANG SAWAH BERDASARKAN
UMUR DAN JENIS KELAMIN

| NO | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 0-5 tahun | 35 | 43 | 78 |
| 2 | 6-10tahun | 18 | 30 | 48 |
| 3 | 11-15 tahun | 71 | 46 | 117 |
| 4 | 16-20 tahun | 93 | 86 | 129 |
| 5 | 21-55tahun | 224 | 219 | 443 |
| 6 | 56 Tahun keatas | 124 | 116 | 240 |
| | Jumlah | 565 | 540 | 1.105 |

Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan

Kampar Kiri, 2009

Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah 1.105 jiwa, jadi jumlah laki-laki berjumlah 540 jiwa dan perempuan berjumlah 565 jiwa, jadi jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Dan dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar pada usia (21-55), yaitu jumlah 443 jiwa dan jumlah terkecil pada usia (6-10) yaitu 48 orang.

C. Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan tolak ukur maju tidaknya suatu masyarakat, artinya semakin tinggi tingkat rata-rata tingkat pendidikan suatu masyarakat semakin tinggi pula kemajuan yang terdapat dipemukiman tersebut. Dan semakin rendah tingkat pendidikannya maka semakin rendah juga kemajuannya. Sehingga jika suatu komunitas masyarakat ingin maju dan berkembang secara baik maka pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya (SDM) harus diperbaiki, dibina dan dikembangkan secara sungguh-sungguh.

Dalam suatu masyarakat tingkat pendidikan yang dimiliki sangat menentukan terhadap lajunya arus perkembangan pembangunan yang dilakukan, dengan tingkat pendidikan yang memadai dari individu akan menambah sumber daya manusia yang berkualitas, karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses pembangunan selain sumber daya alam. Tingkat pendidikan yang ada di Desa Padang Sawah dapat dilihat dari table di bawah ini:

TABEL II.2

TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA PADANG SAWAH

| NO | Pendidikan | Jumlah |
|----|---------------------------|------------|
| 1 | Akademi/ Penguruan Tinggi | 9 orang |
| 2 | SLTA / Sederajat | 45 orang |
| 3 | SLTP / Sederajat | 135 orang |
| 4 | SD | 725 orang |
| | Jumlah | 914 |

Sumber data : Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar

Kiri, tahun 2009

Di lihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa para responden banyak yang menuntut ilmu pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 725 orang, yang berpendidikan SLTP / sederajat dengan jumlah 135 orang, yang berpendidikan SLTA dengan jumlah 45 orang, dan pendidikan Akademik/ perguruan tinggi dengan jumlah 9 orang.

Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Padang Sawah telah ada yaitu : TK, SDN, dan MDA Swasta. Sementara untuk setingkat SLTP dan SMU/Sederajat masyarakat menyekolahkan anaknya keluar desa yaitu ke Kuntu, Lipatkain dan ada juga di Pekanbaru atau di luar Pekanbaru. Sarana pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam menunjang keberhasilan

peserta didik dalam memahami dan mempelajari disiplin ilmu. Selain itu sarana pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menunjang lancarnya proses belajar mengajar. Adapun mengenai sarana pendidikan yang ada di Desa Padang Sawah dapat di lihat pada table di bawah ini:

TABEL II.3
SARANA PENDIDIKAN DI DESA PADANG SAWAH

| NO | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|---------------|
| 1 | SD | 1 buah |
| 2 | MDA | 1 buah |
| 3 | TK | 1buah |
| | Jumlah | 3 buah |

Sumber data : Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar

Kiri, tahun 2009

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pendidikan SDN (Sekolah Dasar Negeri) di Desa Padang Sawah adalah 1 buah, (Taman Kanak-kanak) berjumlah 1 buah, dan MDA (Madrasah Ibtida'iyah) berjumlah 1 buah. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 3 buah.

D. Mata Pencarian Penduduk

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Padang Sawah ada yang golongan atas,

menengah, dan golongan bawah. Kebanyakan dari masyarakat berkerja sebagai petani. Namun demikian sebagian masyarakat ada juga yang hidup sebagai pegawai negeri, pengrajin industri rumah tangga, pedagang, dan jasa. Untuk lebih jelas dapat dilihat table di bawah ini :

TABEL II.4
JENIS MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA PADANG SAWAH

| NO | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah |
|----|---------------------------------|------------------|
| 1 | Pegawai Negeri | 11 orang |
| 2 | Pengrajin Industri Rumah Tangga | 5 orang |
| 3 | Pedagang | 10 orang |
| 4 | Pensiun | 3 orang |
| 5 | Petani | 403 orang |
| 6 | Jasa | 33 orang |
| | Jumlah | 432 orang |

Sumber data : Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, tahun 2009

Data di atas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Desa Padang Sawah dalam memenuhi kehidupannya banyak yang bertani yaitu sebanyak 403 orang. Sedangkan profesi yang paling jarang adalah sebagai pensiun yaitu sebanyak 3 orang.

E. Agama dan Budaya Masyarakat

Agama merupakan salah satu faktor yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Agama juga diakui sebagai salah satu bahkan satu-satunya sumber nilai, baik nilai moral maupun spiritual yang memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar serta paling tinggi harganya bagi setiap jenjang kehidupan manusia. Agama juga mampu memberikan motivasi hidup dan penghidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang sangat penting. Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga ia dapat menjadi manusia yang utuh.³ Penduduk yang ada di Desa Padang Sawah memeluk agama Islam, dan adapun jumlah sarana tempat ibadah masyarakat Desa Padang Sawah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

³M. Yunan Nasution, *Islam dan Problem-Problem Kemasyarakatan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1998), Cet. Ke-1, h. 17

TABEL II.5
SARANA IBADAH DI DESA PADANG SAWAH

| NO | Sarana Ibadah | Jumlah |
|----|----------------|----------------|
| 1 | Masjid | 1 buah |
| 2 | Surau/Mushalla | 9 buah |
| | Jumlah | 10 buah |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana tempat ibadah di Desa Padang Sawah yaitu Masjid ada 1 buah, dan Surau/Mushalla ada 9 buah. Jadi jumlah keseluruhan tempat ibadah di Desa Padang Sawah adalah 10 buah.

Kebudayaan dan masyarakat adalah ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan berasal dari kata sansekerta *buddhyah* yang merupakan bentuk jamak dari kata “*buddhi*” yang berarti budi akal. Dengan demikian kebudayaan dapat di artikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi akal.⁴

Kebudayaan merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat dapat digunakan untuk melindungi manusia dari ancaman atau bencana alam. Di

⁴Hartomo, *op. cit.*, h. 38

samping itu kebudayaan dapat dipergunakan untuk mengatur hubungan dan sebagai wadah segenap manusia sebagai anggota masyarakat.⁵

Masyarakat di Desa Padang Sawah sangat memegang kebudayaan yang di tandai dengan adanya berbagai suku. Adapun nama-nama suku yang ada di desa Padang Sawah yaitu:

1. Suku Domo
2. Suku Piliang
3. Suku Patopang
4. Suku Melayu

Setiap pendatang yang tinggal di Desa Padang Sawah diharuskan memasuki salah satu suku yang ada di Desa sesuai dengan keinginan mereka, walaupun mereka sebelum menjadi penduduk desa tersebut sudah memiliki suku. Selain pemerintahan Desa yang memegang peran penting dalam kebudayaan di Desa ini juga ada namanya ninik mamak.⁶

⁵*Ibid.*

⁶Zulkifli, (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Padang Sawah : 24 September 2010

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD) DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengertian Program Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.¹

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Program Pemberdayaan Desa disingkat dengan PPD adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa, memperkuat kelembagaan masyarakat desa/Kelurahan, dan meningkatkan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasarana bagi

¹HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, h. 77

masyarakat desa/kelurahan, serta mendorong pelebagaan sistem pembangunan partisipatif.²

B. Dasar Hukum Program Pemberdayaan Desa

Adapun dasar hukum Program Pemberdayaan Desa yaitu :

1. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Riau Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang Dalam Rangka Penyaluran Dana Usaha Desa Pada Program Pemberdayaan Desa Nomor : 04/SKB/IV/2005.
2. Peraturan Gubernur Riau Nomor :78 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau.³

C. Bentuk-bentuk Program Pemberdayan Desa

1. Kegiatan Reguler Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan Melalui Sektoral

Kegiatan perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) bidang sektoral adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang berdasarkan sistem partisipatif berdasarkan kebutuhan aktual desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan ketersediaan sumber daya desa/kelurahan.

² Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, (Pekanbaru : 2009), h. 2

³ *Ibid*

Perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui bidang sektoral akan dituangkan dalam bentuk Rencana Jangka Menengah (RJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K).

a. Rencana Jangka Menengah (RJM)

Rencana Jangka Menengah merupakan daftar prioritas pembangunan desa/kelurahan selama 5 (lima) tahun dibidang peningkatan ekonomi makro, pendidikan dan pemenuhan infra struktur yang dihasilkan dari penggalian potensi dan gagasan dengan sistem partisipatif menggunakan metode PRA (Participatory Rural Appraisal).

Rencana Jangka Menengah desa/kelurahan minimal memuat Kondisi umum desa/kelurahan (potensi dan masalah), visi dan misi, tujuan pembangunan, sasaran pembangunan desa/kelurahan dan prioritas pembangunan desa/kelurahan untuk masa waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K)

Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K) merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah (RJM), yang disusun berdasarkan skala prioritas dan berkesinambungan untuk satu tahun anggaran. Penyusunan skala prioritas RJM dan RPTD/K dilakukan dengan metode partisipatif, dimulai dari tahap identifikasi potensi dan kebutuhan di tingkat kelompok, RT, dusun dan

desa.kelurahan, dengan melibatkan segenap unsur masyarakat serta keterwakilan kepentingan kelompok perempuan.

Untuk kegiatan ekonomi produktif dengan siklus usaha maksimal 24 bulan akan dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat desa/kelurahan, sedangkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan bidang ekonomi makro akan dilaksanakan oleh Dinas Instansi sesuai dengan mekanisme Perencanaan Pembangunan Nasional.⁴

2. Kegiatan Bidang Ekonomi Mikro Melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang di Kelola Oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP).

a. Pengertian Dana Usaha Desa/Kelurahan

Dana Usaha Desa adalah dana yang disediakan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dalam APBD masing-masing (dalam penyalurannya bekerja sama dengan BRI untuk pertama kali dimulai pada tahun anggaran 2005) untuk Desa/Kelurahan, dalam rangka pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau, yang bertujuan untuk mendorong kegiatan perekonomian, meningkatkan kegiatan berusaha masyarakat berpenghasilan rendah, menghindarkan masyarakat dari praktek ijon,

⁴Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, *Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, (Pekanbaru : 2009), Cet. Ke-2, h. 4-5

mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana, serta meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib bagi masyarakat.

Pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan harus transparan dan terbuka, termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengurus, pengelolaan serta penyaluran dana. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan mudah dan terbuka, disebar luaskan melalui papan informasi, selebaran, pertemuan-pertemuan atau melalui media lainnya.

Masyarakat memberikan swadaya untuk setiap kegiatan yang diusulkan sebagai salah satu indikasi adanya kesungguhan dan kebutuhan akan kegiatan tersebut. Pada dasarnya Dana Usaha Desa/Kelurahan terbuka terhadap segala usulan kegiatan ekonomi masyarakat. Prioritas jenis kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Usaha Desa/Kelurahan diberikan kepada kegiatan yang mensejahterakan dan melibatkan banyak masyarakat miskin.

Dana Usaha Desa/Kelurahan secara garis besar digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Kegiatan usaha ekonomi produktif desa/kelurahan diklasifikasikan sebagai kegiatan non infrastruktur yang

mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga atau kelompok usaha.⁵

b. Pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan

1) Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan PPD adalah pemihakan kepada orang miskin, transparansi, partisipasi, desentralisasi dan demokratisasi.

Pada prinsipnya Dana Usaha Desa PPD sangat terbuka (Open Menu) untuk membiayai segala jenis kegiatan usaha yang disusulkan oleh masyarakat (kecuali beberapa jenis kegiatan yang dilarang), terutama kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan banyak masyarakat miskin, meningkatkan kesempatan berusaha serta memiliki potensi untuk berkembang dan keberlanjutan yang meliputi:

- a. Kegiatan ekonomi yang dapat menunjang Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan serta mendorong pengembangan pengembangan aktifitas ekonomi produktif, meningkatkan efisiensi berusaha dan memperkuat akses terhadap sentra produksi dan pasar.

⁵*Ibid*

- a. Kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat memperluas kesempatan berusaha dan pengembangan usaha bagi kelompok masyarakat miskin.

2) Ketentuan Dasar

Dana Usaha Desa/Kelurahan adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada rekening desa/kelurahan dan hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara kelompok atau perorangan melalui Lembaga UED/K-SP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dana Usaha Desa/Kelurahan digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam, merupakan kredit yang harus dikembalikan ke rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan melalui pengelola UED/K-SP, dengan tingkat suku bunga tertentu serta jangka waktu tertentu, maksimal 24 bulan sesuai dengan porsi peruntukannya.
- b. Pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan adalah seluruh warga Desa/Kelurahan yang memenuhi persyaratan sebagai peminjam seperti yang diatur pada Petunjuk Teknis PPD.
- c. Penetapan besarnya suku bunga ditetapkan melalui musyawarah desa /kelurahan.

- d. Jangka waktu pengembalian pinjaman dari UED/K-SP ke rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan ditetapkan melalui musyawarah desa/kelurahan.
- e. Jangka waktu pengembalian pinjaman dari masyarakat pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan ke Pengelola UED/K-SP disesuaikan dengan siklus usaha maksimal 24 bulan.
- f. Dana Usaha Desa/Kelurahan yang telah dikembalikan dapat digulirkan kembali kepada Masyarakat Desa/Kelurahan melalui mekanisme perguliran yang diatur dalam ketentuan perguliran.
- g. Anggota atau kelompok pemanfaat/peminjam Dana Usaha Desa/Kelurahan tidak dapat mengalihkan dana dan tanggung jawab kepada orang lain.
- h. Untuk setiap pelanggaran terhadap prinsip dan ketentuan dasar kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan program serta norma-norma hukum yang berlaku.
- i. Dana Usaha Desa/Kelurahan tidak dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana/prasarana desa/kelurahan dan kegiatan yang termasuk daftar larangan.

3) Daftar Larangan

Dana Usaha Desa/Kelurahan tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan :

- a. Pembiayaan gaji pegawai negeri dan aparat desa.
- b. Pembelian Chainshaw, senjata, bahan peledak, dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan.
- c. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja.
- d. Pembiayaan Kegiatan politik praktis/partai politik.
- e. Pembiayaan apa saja yang berkaitan dengan kegiatan militer atau angkatan bersenjata.
- f. Pembiayaan kegiatan yang dapat merusak lingkungan.
- g. Pembiayaan kegiatan yang dilarang berdasarkan norma hukum positif yang berlaku.

4) Sanksi

Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam PPD. Sanksi

bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PPD.⁶

c. Pengertian Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam

UED-SP adalah singkatan dari Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam , yaitu lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa.

Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya, antara lain:

1. Perdagangan : Kios, Warung, pengumpul, dll
2. Pertanian : Tanaman pangan
3. Perkebunan : sawit, karet, kelapa, dll
4. Peternakan : itik, ayam, sapi, kerbau, kambing.
5. Perikanan : perikanan tangkap, tambak
6. Jasa: perbengkelan, salon, service komputer dan Hp
7. Industri Rumah Tangga : pembuatan minyak kelapa, gula aren, genteng, batu bata, pengolahan ikan, gerabah, anyaman, dll

⁶ Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, *op. cit.*, h. 12-14

Selanjutnya UED-SP berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut.⁷

Adapun prosedur pemberian pinjaman pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Pinjaman

- a. Warga masyarakat yang ingin meminjam membuat kartu anggota dan mempunyai simpanan wajib minimal sebesar Rp. 50.000,-
- b. Masyarakat yang ingin meminjam memiliki usaha atau rencana usaha, mengajukan dan melengkapi permohonan proposal pinjaman, serta mengisi formulir usulan rencana usaha anggota.
- c. Usulan rencana usaha anggota dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha.
- d. Pemohon pinjaman memiliki barang yang bisa di jadikan untuk agunan
- e. Surat pernyataan kesanggupan membayar angsuran pinjaman di atas kertas bermaterai.

⁷ Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, *Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan UED-SP Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, (Pekanbaru : 2009), Cet. Ke-2, h. 2

D. Tujuan Program Pemberdayaan Desa

Tujuan Program Pemberdayaan Desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan menuju kemandirian desa.

Program Pemberdayaan Desa menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. Perluasan kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk:
 - a. Penciptaan iklim pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin
 - b. Penciptaan lapangan kerja
 - c. Penyediaan bantuan permodalan yang berpihak kepada masyarakat miskin
 - d. Penguatan peran aparat pemerintah desa/kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk:
 - a. Penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan

- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa/kelurahan
- c. Pembangunan desa/kelurahan secara terencana dan berkelanjutan
- d. Penguatan kapasitas kelompok dan anggota usaha kecil dan menengah⁸

⁸*Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pogram Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Desa Padang Sawah

Pemberdayaan ekonomi sebenarnya tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat dan merupakan satu kesatuan yang meyeluruh di dalam masyarakat, namun bersifat individu, dengan adanya program pemberdayaan desa (PPD) ditengah masyarakat dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Padang Sawah. Masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) apakah dalam kondisi bekerja atau tidak dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.1
MASYARAKAT DALAM KONDISI BEKERJA

| NO | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PARSENTASE |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Ya | 90 Orang | 100% |
| 2 | Tidak | - | - |
| | Jumlah | 90 Orang | 100% |

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa masyarakat yang dalam kondisi bekerja adalah 90 orang atau 100%, dan masyarakat yang tidak bekerja tidak ada atau 0%. Dari keterangan di atas dapat di analisa bahwa seluruh masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari Program

Pemberdayaan Desa (PPD) dalam kondisi bekerja. Untuk mengetahui lapangan pekerjaan masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.2
LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA MASYARAKAT YANG
MEMINJAM KEPADA UED-SP DARI PPD

| NO | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PARSENTASE |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Petani | 27 Orang | 30% |
| 2 | Pedagang | 52 Orang | 58% |
| 3 | Buruh/Jasa | 8 Orang | 9% |
| 4 | Lain-lain | 3 Orang | 3% |
| | Jumlah | 90 Orang | 100% |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang bekerja dibidang pertanian sebanyak 27 orang atau 30%, masyarakat yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 52 orang atau 58%, yang bekerja sebagai buruh/jasa sebanyak 8 orang atau 9%, dan bekerja dibidang yang lain sebanyak 3 orang atau 3%. Dari keterangan di atas dapat di analisa bahwa pekerjaan utama masyarakat yang meminjam banyak yang dibidang perdagangan, dibidang pertanian hanya sebagian, dan yang paling sedikit dibidang yang lainnya. Untuk mengetahui pekerjaan sampingan masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.3
PEKERJAAN SAMPINGAN MASYARAKAT YANG MEMINJAM
KEPADA UED-SP DARI PPD

| NO | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PARSENTASE |
|----|---------------------------------|----------|------------|
| 1 | Peternak | 47 Orang | 52% |
| 2 | Tukang Kayu | 23 Orang | 26% |
| 3 | Pengrajin Industri Rumah Tangga | 11 Orang | 12% |
| 4 | Perikanan | 9 Orang | 10% |
| | Jumlah | 90 Orang | 100% |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai peternak sebanyak 47 orang atau 52%, pekerjaan sampingan sebagai tukang kayu sebanyak 23 orang atau 26%, pekerjaan sampingan sebagai pengrajin industri rumah tangga sebanyak 11 orang atau 12%, dan pekerjaan sampingan sebagai perikanan sebanyak 9 orang atau 10%. Dari keterangan di atas dapat dianalisa bahwa seluruh masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa memiliki pekerjaan sampingan. Untuk mengetahui pendapatan perbulan dari pekerjaan utama masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.4
PENDAPATAN MASYARAKAT PERBULAN DARI PEKERJAAN
UTAMANNYA

| NO | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PARSENTASE |
|----|--------------------------|----------|------------|
| 1 | <Rp.500.000 | - | - |
| 2 | Rp.500.000- Rp.1.000.000 | 27 Orang | 30% |
| 3 | >Rp.1.000.000 | 63 Orang | 70% |
| | Jumlah | 90 Orang | 100% |

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa pendapatan masyarakat perbulan dari pekerjaan utamanya yang memiliki pendapatan di bawah Rp500.000,- tidak ada atau 0%, masyarakat yang memiliki pendapatan perbulan dari pekerjaan utama antara Rp.500.000-Rp.1.000.000 sebanyak 27 orang atau 30 %, dan masyarakat yang memiliki pandapatan perbulan dari pekerjaan utama diatas Rp.1.000.000,- sebanyak 63 orang atau 70%.

Dari keterangan di atas dapat dianalisa bahwa masyarakat yang memiliki pendapatan dari pekerjaan utamanya diatas Rp1.000.000,- lebih banyak bila dibandingkan dengan pendapatan utama mereka di bawah Rp1.000.000,-.

Untuk mengetahui pendapatan perbulan dari pekerjaan sampingan masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.5
PENDAPATAN MASYARAKAT PERBULAN DARI PEKERJAAN
SAMPINGANNYA

| NO | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PARSENTASE |
|----|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Rp.100.000 – Rp.300.000 | 60 Orang | 67% |
| 2 | Rp.400.000 – Rp.500.000 | 25 Orang | 28% |
| 3 | Rp.600.000 – Rp.800.000 | 5 Orang | 5% |
| | Jumlah | 90 Orang | 100% |

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang memiliki pendapatan sampingan perbulan dibawah antara Rp.100.000 – Rp.300.000 sebanyak 60 orang atau 67%, masyarakat yang memiliki pendapatan sampingan perbulan antara Rp.400.000 – Rp.500.000 sebanyak 25 orang atau 28%, dan masyarakat yang memiliki pendapatan sampingan perbulan antara Rp.600.000 – Rp.800.000 sebanyak 5 orang atau 5%. Dari keterangan di atas dapat dianalisa bahwa seluruh masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) seluruh mereka memiliki pendapatan sampingan perbulan, dan pendapatan sampingan perbulan mereka paling banyak antara Rp.100.000 – Rp.300.000, serta yang paling sedikit adalah antara Rp.600.000 – Rp.800.000.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) mengatakan “Setiap masyarakat yang meminjam kepada UED-SP yaitu memakai agunan berupa BPKB atau

Sertifikat tanah”.¹Besarnya pinjaman yang di berikan oleh UED-SP ini kepada masyarakat yang meminjam maksimal adalah Rp. 20.000.000,- dan minimal Rp. 1.000.000,-,² Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat berapa besarnya pinjaman yang diperoleh atau yang diajukan oleh masyarakat yaitu terdapat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.6
BESARNYA JUMLAH PINJAMAN YANG DIAJUKAN OLEH
MASYARAKAT KEPADA UED - SP DARI PROGRAM
PEMBERDAYAAN DESA (PPD)

| N O | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PERSENTASE |
|--------|-------------------------------|----------|------------|
| 1 | Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 | 11 Orang | 12% |
| 2 | Rp. 5.000.000-10.000.000 | 26 Orang | 29% |
| 3 | >Rp. 10.000.000 | 53 Orang | 59% |
| | Jumlah | 90 Orang | 100% |

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) mulai dari jumlah Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 sebanyak 11 orang atau 12%, masyarakat yang mengajukan pinjaman dari jumlah Rp.5.000.000-

¹Dewi S, (Tata Usaha), *wawancara*, Padang Sawah : 28 September 2010

² Setia Budi, (Kasir), *wawancara*, Padang Sawah : 28 September 2010

Rp.10.000.000 adalah 26 orang atau 29%, dan masyarakat yang mengajukan pinjaman di atas Rp.10.000.000,- sebanyak 53 orang atau 59%. Dari penjelasan di atas dapat di analisa bahwa masyarakat lebih banyak mengajukan pinjaman di atas Rp.10.000.000,- ,sedangkan masyarakat yang mengajukan pinjaman dibawah Rp.5.000.000,- hanya sedikit. Hal ini menunjukan bahwa banyak sebagian masyarakat yang sangat membutuhkan dana pinjaman untuk menambah modal, supaya usaha mereka bisa berkembang.

Pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat desa Padang Sawah sama dengan pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat pada umumnya, kemudahan yang didapat oleh peminjam salah satunya yaitu masyarakat atau peminjam tidak perlu keluar desa atau ke bank untuk pergi meminjam, Karena di Desa Padang Sawah sudah ada tempat pinjam meminjam yaitu Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dari Program Pemberdayaan Desa Padang Sawah.

Dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, usaha yang dilakukan oleh PPD yaitu mensosialisasikan dan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk menambah modal usaha masyarakat.³ Bidang usaha yang diberikan pinjaman kepada masyarakat Padang Sawah adalah sebagai berikut :

³Yusro, (Tokoh Perempuan), wawancara, Padang Sawah : 28 September 2010

1. Usaha dagang
2. Pertanian
3. Perkebunan
4. Usaha jasa
5. Usaha cucian Motor
6. Dan usaha lainnya⁴

Adapun strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah adalah dengan cara mensosialisasikan bahwa kemudahan yang di dapat oleh anggota atau sebagai peminjam, serta bunga pinjaman yang ringan.⁵ Untuk mengetahui jawaban dari masyarakat tentang prosedur pengambilan dana pinjaman apakah masyarakat mengalami kesulitan atau tidak, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

⁴Tarzan, (Lembega Pemberdayaan Masyarakat), *Wawancara*, Padang Sawah : 29 September 2010

⁵Kasmono, (Ketua UED-SP), *wawancara*, Padang Sawah : 30 September 2010

TABEL IV.7
PROSEDUR PENGAMBILAN DANA PINJAMAN PADA UED-SP
DARI PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD)

| N O | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PERSENTASE |
|--------|---------------------------|----------|------------|
| 1 | Mengalami kesulitan | - | - |
| 2 | Tidak mengalami kesulitan | 90 Orang | 100% |
| | Jumlah | 90 Orang | 100% |

Dari tabel di atas masyarakat yang mengambil dana pinjaman yang mengalami kesulitan tidak ada atau 0%, sedangkan masyarakat yang tidak mengalami kesulitan adalah 90 orang atau 100%. Dari keterangan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa prosedur dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang diberikan kepada masyarakat yang meminjam untuk menambah modal usaha, masyarakat tidak mengalami kesulitan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa di Desa Padang Sawah mengatakan bahwa prosedur meminjam kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa tidak sulit dan persyaratannya mudah.⁶ Untuk mengetahui apakah dana yang di pinjam oleh masyarakat benar-benar digunakan untuk modal usaha atau tidak, jawabannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

⁶ Siti Aminah, (Anggota Masyarakat), *wawancara*, Padang Sawah : 4 Oktober 2010

TABEL IV.8
PINJAMAN YANG DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT
KEPADA UED-SP DARI PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA
(PPD)

| NO | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|-----------------------------|----------|------------|
| 1 | Biaya Sekolah | - | - |
| 2 | Modal Usaha | 84 Orang | 93% |
| 3 | Kebutuhan hidup sehari-hari | 6 Orang | 7% |
| 4 | Lain-lain | - | - |
| | Jumlah | 90 Orang | 100% |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang menggunakan pinjaman untuk biaya sekolah tidak ada atau 0%, masyarakat yang menggunakan untuk modal usaha 84 orang atau 93%, yang menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu 6 orang atau 7%, dan yang menggunakan untuk yang lain-lain tidak ada atau 0%. Dari keterangan di atas dapat dianalisa bahwa masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari PPD banyak yang menggunakan pinjaman tersebut untuk modal usaha mereka, tetapi ada sebagian kecil yang tidak menggunakan untuk modal usaha. Untuk mengetahui apakah perkembangan usaha masyarakat bisa meningkat atau tidak, dapat di lihat pada berikut :

TABEL IV. 9
RESPON MASYARAKAT TENTANG PENINGKATAN USAHA
EKONOMINYA

| NO | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Meningkat | 90 Orang | 100% |
| 2 | Tidak meningkat | - | - |
| | Jumlah | 90 Orang | 100% |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yang mengalami peningkatan adalah 90 Orang atau 100%, dan masyarakat yang tidak mengalami peningkatan tidak ada atau 0%. Dapat disimpulkan bahwa dari angket penulis sebarakan, seluruh responden menjawab meningkat, hal ini menunjukkan seluruh masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa usaha mereka mengalami perkembangan.

Adapun jangka waktu pinjaman yang diberikan oleh UED-SP kepada peminjam paling lama 24 bulan (2 tahun) dan minimal 18 bulan,⁷ serta bunga pinjaman yang ringan diberikan kepada peminjam adalah 1,25%/bulan atau 15%/tahun.⁸

⁷ Ardiyandi S, (Tim Verifikasi II), *wawancara*, Padang Sawah : 29 September 2010

⁸Dahan S, (Kader Pembangunan Masyarakat I), *wawancara*, Padang Sawah : 30 September 2010

Respon masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Desa di Desa Padang Sawah adalah mereka mendukung adanya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dari Program Program Pemberdayaan Desa karena dapat menambah modal usaha mereka.⁹ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat bahwa meminjam kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa bunganya ringan dan tidak memberatkan peminjam,¹⁰ besarnya bunga pinjaman yang diberikan adalah 15 %/tahun atau 1,25%/bulan.¹¹ Tanggapan masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Desa (PPD) dapat dilihat pada tabel berikut :

⁹Arafik, (Kepala Desa), *wawancara*, Padang Sawah : 30 September 2010

¹⁰Rambun, (Masyarakat), *wawancara*, Padang Sawah : 2 Oktober 2010

¹¹Basrin Siregar, (Masyarakat), *wawancara*, Padanga Sawah : 3 Oktober 2010

TABEL IV.10
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG UED-SP DARI
PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD)

| NO | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Sangat baik | 63 Orang | 70% |
| 2 | Baik | 19 Orang | 21% |
| 3 | Cukup baik | 8 Orang | 9% |
| 4 | Tidak baik | - | - |
| | Jumlah | 90 Orang | 100% |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang menganggap sangat baik adalah 63 orang atau 70%, masyarakat yang menganggap baik adalah 19 orang atau 21%, yang menganggap cukup baik adalah 8 orang atau 9%, dan tidak baik tidak ada atau 0%. Dari sini dapat diketahui bahwa masyarakat desa Padang Sawah banyak yang menganggap sangat baik dengan adanya Program Pemberdayaan Desa (PPD).

B. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Desa Padang Sawah

Program Pemberdayaan Desa adalah bertujuan untuk membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat pedesaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) mengatakan bahwa “kebijakan yang dilakukan oleh Program

Pemberdayaan Desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Padang Sawah adalah dengan memberikan arahan kepada peminjam untuk menggunakan pinjaman tersebut sebaik mungkin dan bisa hendaknya meningkatkan usaha mereka”.¹²

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat pada Program Pemberdayaan Desa(PPD) di Desa Padang Sawah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

Banyak masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha mereka, jumlah masyarakat yang membutuhkan ada sekitar 90 orang.

2. Faktor penghambat :

Dalam pengembalian pinjaman ada sebagian masyarakat yang terlambat yaitu sekitar 18 orang yang terlambat mengembalikan pinjaman tersebut kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa (PPD).¹³

Pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Program Pemberdayaan Desa (PPD) di desa Padang Sawah adalah sebagai berikut :

¹²R.yuliana, (Kader Pembangunan Masyarakat II), *wawancara*, Padang Sawah : 30 September 2010

¹³M. Malis, (Tim Verifikasi I), *wawancara*, Padang Sawah : 29 Septebaer 2010

1. Telah terbentuknya Dana Usaha Desa yang dipegang oleh otoritas rekening desa, dalam hal ini dipegang oleh Kepala Desa dan ditandatangani oleh tokoh perempuan dengan ketua dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Padang Sawah.
2. Telah terbentuknya pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Padang Sawah yang terdiri dari Ketua, Kasir, dan Tata Usaha. UED-SP di Desa Padang Sawah terbentuk dari hasil musyawarah Desa pada bulan Juni 2007 dengan nama UED-SP Sejahtera Desa Padang Sawah. UED-SP ini membuka rekening untuk menampung dana yang disalurkan dari rekening Dana Usaha Desa (DUD).
3. Telah terbentuk dan terlaksana Tim Verifikasi yang terdiri dari 3 orang, adapun tugas dari Tim Verifikasi ini ialah memeriksa administrasi dan kelengkapan proposal yang diajukan oleh peminjam serta pemeriksaan di lapangan. Tim Verifikasi ini dibantu oleh Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terdiri 2 orang.
4. Telah terbentuk dan terlaksananya Pengawas Umum (PU) Dana Usaha Desa yang ditunjuk melalui keputusan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Melalui hasil musyawarah desa maka telah terlaksana Program Pemberdayaan Desa (PPD) di desa Padang Sawah dan telah berjalan sesuai dengan perencanaan, yaitu telah berjalannya kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Padang Sawah dan masyarakat telah merasakan

kegunaan dan manfaat dari Program ini, serta bisa meningkatkan usaha masyarakat. Usaha dari Program tersebut adalah berbentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat di berbagai bidang usaha yaitu : usaha perdagangan, pertanian, usaha jasa dan lainnya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Padang Sawah telah terlaksana sesuai dengan peraturan Gubernur Riau Nomor 78 tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, akan tetapi dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) yaitu sebagian kecil masyarakat atau anggota salah gunakan atas pinjaman yang diberikan, seperti untuk kebutuhan sehari-hari atau tidak digunakan untuk membuka usaha ada sekitar 6 Orang, sehingga untuk pengembalian pinjaman tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa di desa Padang Sawah mengatakan bahwa “dengan adanya Program Pemberdayaan Desa (PPD) di desa Padang Sawah, maka saya sebagai peminjam sangat terbantu karena bisa meminjam dalam jumlah yang kecil dan untuk

¹⁴ A. Ridwan, (Pengawas Umum), *wawancara*, Padang Sawah : 30 September 2010

mengembalikan pinjamannya tidak jauh atau tidak perlu keluar desa.¹⁵

Berikut adalah contoh masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari Program pemberdayaan desa.

Contoh 1:

Pak Ali meminjam uang kepada UED-SP untuk menambah modal usahanya sebanyak Rp. 10.000.000,- dengan periode pinjaman 18 bulan, dan bunganya per bulan 1,25%.

Untuk pengembalian pinjaman tersebut pak Ali harus membayar pinjamannya setiap bulan dengan angsuran tetap, bunga ditambah dengan angsuran pokoknya perbulan. Untuk mengetahui berapa angsuran pokok dan angsuran bunga yang harus di bayar oleh pak Ali perbulan adalah sebagai berikut :

Angsuran pokok : jumlah pinjaman: periode pinjaman

: Rp. 10.000.000 : 18 bulan

: Rp. 555.555,5556,-

Angsuran bunga : jumlah pinjaman x jumlah bunga perbulan

Angsuran bunga : Rp. 10.000.000 x 1,25%

: Rp.125.000,-

¹⁵M. Nazir, (Masyarakat), wawancara, Padang Sawah : 5 Oktober 2010

Jadi, angsuran pokok yang harus dibayar perbulan oleh pak Ali adalah sebanyak Rp.555.555,5556,- dan angsuran bunga perbulannnya sebanyak Rp. 125.000,-

Total angsuran yang harus di bayar oleh pak Ali setiap bulan ke UED-SP adalah angsuran pokok + angsuran bunga.

$$\text{Rp.555.555,5556} + \text{Rp.125.000} = \text{Rp.680.555,5556,-}$$

Jadi, total angsuran setiap bulannya adalah Rp.680.555,5556,-

Contoh 2:

Pak Ahmad meminjam uang kepada UED-SP untuk menambah modal usahanya sebanyak Rp. 20.000.000,- dengan periode pinjaman 24 bulan, dan bunganya per bulan 1,25%.

Untuk pengembalian pinjaman tersebut pak Ahmad harus membayar pinjamannya setiap bulan dengan angsuran tetap, bunga ditambah dengan angsuran pokoknya perbulan. Untuk mengetahui berapa angsuran pokok dan angsuran bunga yang harus di bayar oleh pak Ali perbulan adalah sebagai berikut :

Angsuran pokok : jumlah pinjaman: periode pinjaman

$$: \text{Rp. 20.000.000} : 24 \text{ bulan}$$

$$: \text{Rp. 833.333,3333,-}$$

Angsuran bunga : jumlah pinjaman x jumlah bunga perbulan

Angsuran bunga : Rp. 20.000.000 x 1,25%

: Rp.250.000,-

Jadi, angsuran pokok yang harus dibayar perbulan oleh pak Ahmad adalah sebanyak Rp.833.333,3333,- dan angsuran bunga perbulannnya sebanyak Rp. 250.000,-

Total angsuran yang harus di bayar oleh pak Ali setiap bulan ke UED-SP adalah angsuran pokok + angsuran bunga.

$Rp.833.333,3333 + Rp.250.000 = Rp.1.083.333,333,-$

Jadi, total angsuran setiap bulannya adalah Rp.1.083.333,333,-

Dari contoh diatas bahwa pengembalian pinjaman pada UED-SP dari program pemberdayaan desa di desa Padang Sawah adalah memakai tingkat suku bunga dengan jumlah bunga 15% atau 1,25% perbulan. Masyarakat yang meminjam, mengembalikan pinjamannya setiap bulan dengan bunga yang tetap ditambah dengan pinjaman pokok tanpa melihat apakah usaha masyarakat yang meminjam tersebut mengalami keuntungan atau rugi.

C. Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam

Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam, dan karenanya ekonomi Islam akan terwujud hanya jika ajaran Islam diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam Alquran dan Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya.

Secara umum ekonomi Islam di defenisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas alQuran dan Sunnah. Jadi, ilmu ekonomi Islam mendasarkan segala aspek tujuan, metode penurunan ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung pada agama Islam.¹⁶

Adapun tujuan dari ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

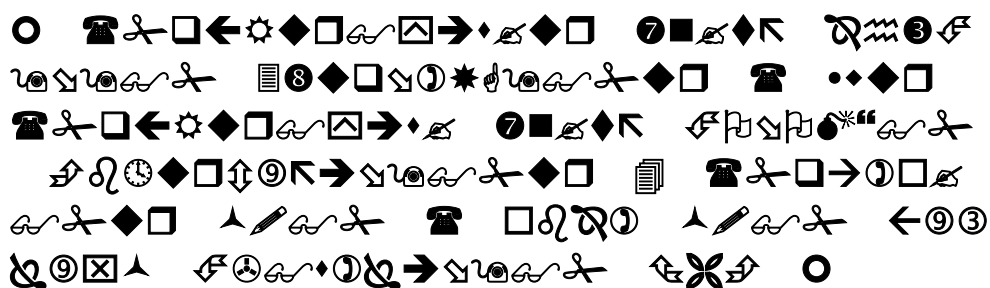
1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.

¹⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1, h. 43-44

4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.¹⁷

Program Pemberdayaan Desa adalah Program dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkat pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan adanya program ini di desa Padang Sawah, masyarakat merasa terbantu dalam pengembangan usaha ekonomi mereka, yang mana Program Pemberdayaan Desa (PPD) memberikan dana pinjaman kepada masyarakat di desa Padang Sawah yaitu dari Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam.

Usaha Ekonomi Simpan Pinjam ini memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam berbagai usaha, seperti : usaha perdagangan, pertanian, usaha jasa dan usaha lainnya. Dengan adanya pinjaman yang di berikan oleh UED-SP ini masyarakat merasakan manfaatnya, karena mereka bisa terbantu dalam mengembangkan usahanya. Demikianhalnya dengan ajaran islam, membantu dan saling tolong menolong sangat dianjurkan sesama makhluk Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:



¹⁷Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru : Unri Press, 2004), Cet. Ke-1, h. 3-4

Artinya : “.....*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”.¹⁸

Dilihat dari tujuan pemberian pinjaman untuk masyarakat ini dan berdasarkan ayat diatas maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi Islam yaitu untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya pemberian pinjaman ini bertujuan untuk membantu masyarakat, dan bukan hanya semata mencari keuntungan dalam berbisnis atau usah sebagai tujuan utamanya.

¹⁸ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Toha Putra), Cet. Ke-1, h. 160

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis lakukan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) di desa Padang Sawah dalam memberikan pinjaman atau modal kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menambah modal usaha, telah membantu dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, dan dalam upaya memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan prosedur yang mudah.
2. Pelaksanaan dalam Program Pemberdayaan Desa di desa Padang Sawah sudah sesuai dengan peraturan Gubernur Riau No.78 tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau.
3. Bila ditinjau dari segi ekonomi Islam Pada Program Pemberdayaan Desa di desa Padang Sawah dalam mencapai tujuannya telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu mensejahterakan dan membantu meningkatkan usaha ekonomi masyarakat.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua.

Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah yang menyelenggarakan Pogram Pemberdayaan Desa ini hendaknya dapat membantu meningkatkan usaha ekonomi masyarakat Desa.
2. Kepada masyarakat yang mendapatkan dana pinjaman dari pemerintah tersebut gunakanlah dan manfaatkanlah sebaik-baik mungkin, karena pemerintah ingin membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui Program Pemberdayaan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembnagunan Desa, Pemerintah Provinsi Riau, *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, (Pekanbaru : Tahun 2009), Cet. Ke-2
- _____, *Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, (Pekanbaru : Tahun 2009), Cet. Ke-2
- _____, *Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keunagan UED-SP Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, (Pekanbaru : 2009), Cet. Ke-2
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, Tahun 2000), Cet. Ke-1
- _____, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya : Risalah Gusti, Tahun 1999), Cet. Ke-1
- Depag, RI, *alQuran dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Toha Putra), Cet. Ke-2
- Djazuli, H. Ahmad, Prof. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Kencana, Tahun 2007), Ed. 1., Cet. Ke-2
- Edwin Nasution, Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, Tahun 2007), Cet. Ke-2
- Gamal, Merza, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru : Unri Press, Tahun 2004), Cet. Ke-1
- Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Ed. 1, Cet. Ke-5
- J.Rachbini, Didik, Prof. Dr. *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun 2003), Cet. Ke-1
- Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan & Pemerataan*, (Jakarta: PT Pustaka Cedesindo, Tahun 1996), Cet. Ke-1
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam Di Tenagah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta : Zikrul Hakim, Tahun 2004), Cet. Ke-1
- Nasution, M. Yunan, *Islam dan Problem-Problem Kemasyarakatan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1998), Cet. Ke-1
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1

Sholahuddin, Muhammad, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2007), Ed. 1

Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Tahun 2003), Cet. Ke-1

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 1999), Cet. Ke-12

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2008), Ed. 3, Cet. Ke-1

Widjaja, HAW., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel II.1 | : Kondisi penduduk desa Padang Sawah berdasarkan umur dan jenis kelamin..... | 15 |
| Tabel II.2 | : Tingkat Pendidikan masyarakat desa Padang Sawah..... | 17 |
| Tabel II.3 | : Sarana pendidikan di Desa Padang Sawah..... | 18 |
| Tabel II.4 | : Jenis mata pencaharian masyarakat desa Padang Sawah | 19 |
| Tabel II.5 | : Sarana ibadah di Desa Padang Sawah..... | 21 |
| Tabel IV.1 | : Masyarakat dalam kondisi bekerja..... | 36 |
| Tabel IV.2 | : Lapangan pekerjaan utama masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari PPD | 37 |
| Tabel IV.3 | : Pekerjaan sampingan masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari PPD | 38 |
| Tabel IV.4 | : Pendapatan masyarakat perbulan dari pekerjaan utamanya | 39 |
| Tabel IV.5 | : Pendapatan masyarakat perbulan dari pekerjaan sampingannya | 40 |
| Tabel IV.6 | : Besarnya jumlah pinjaman yang diajukan oleh masyarakat kepada UED-SP dari PPD..... | 41 |
| Tabel IV.7 | : Prosedur pengambilan dana pinjaman pada UED-SP dari PPD | 44 |
| Tabel IV.8 | : Pinjaman yang digunakan oleh masyarakat kepada UED-SP dari PPD..... | 45 |
| Tabel IV.9 | : Respon masyarakat tentang peningkatan usaha ekonominya | 46 |
| Tabel IV.10 | : Tanggapan masyarakat tentang UED-SP dari PPD | 48 |

STRATEGI PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD) DALAM MENGEMBANGKAN
EKONOMI MASYARAKAT DI DESA
PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR

Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Pekanbaru

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I saat ini dalam kondisi bekerja?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Lapangan pekerjaan utama Bapak/Ibu/Saudara/I?
 - a. Petani
 - b. Pedagang
 - c. Buruh/Jasa
 - d. Lain-lain

3. Pekerjaan sampingan Bapak/Ibu/Saudara/I?
 - a. Peternakan
 - b. Tukang kayu
 - c. Pengrajin Industri Rumah Tangga
 - d. Perikanan
4. Pendapatan perbulan dari pekerjaan utama Bapak/Ibu/Saudara/I?
 - a. <Rp.500.000
 - b. Rp.500.000 – Rp.1.000.000
 - c. >Rp.1.000.000
5. Pendapatan perbulan dari pekerja sampingan Bapak/Ibu/Saudara/I?
 - a. Rp.100.000 – Rp.300.000
 - b. Rp.400.000 – Rp.500.000
 - c. Rp.600.000 – Rp.800.000
6. Berapakah besarnya jumlah pinjaman yang Bapak/Ibu/Saudara/I ajukan kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) ?
 - a. Rp.1.000.000 – Rp.5.000.000
 - b. Rp. 5.000.000 – Rp 10.000.000
 - c. >Rp.10.000.000
7. Apakah prosedur pengambilan dana pinjaman pada UED-SP dari PPD mengalami kesulitan?
 - a. Mengalami kesulitan
 - b. Tidak mengalami kesulitan
8. Untuk apakah dana pinjaman tersebut Bapak/Ibu/Saudara/I gunakan?
 - a. Biaya Sekolah
 - b. Modal Usaha
 - c. Kebutuhan hidup sehari-hari
 - d. Lain-lain
9. Apakah dana pinjaman tersebut dapat meningkatkan usaha ekonomi Bapak/Ibu/Saudara/I?
 - a. Meningkatkan
 - b. Tidak meningkat
10. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/I tentang UED-SP dari PPD?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Tidak baik

PEDOMAN OBSERVASI

A. Melihat Proses Pelaksanaan Kegiatan Program Pemberdayaan Desa (PPD)

1. Meneliti dari mana dana PPD
2. Meneliti berapa jumlah dana yang diterima PPD
3. Meneliti bagaimana pengelolaan dana PPD

B. Melihat Keadaan Warga Masyarakat Desa yang menerima PPD tersebut

1. Melihat bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa sebelum dan sesudah adanya PPD
2. Melihat keadaan Desa secara umum di berbagai bidang (Agama, Sosial, Budaya, Ekonomi dan Pendidikan)

WAWANCARA

A. Untuk pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Padang Sawah

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa (PPD)?
2. Apa tujuan UED-SP dari PPD?
3. Apa visi dan misi UED-SP dari PPD?
4. Usaha apa saja yang dilakukan UED-SP dari PPD untuk mengembangkan ekonomi masyarakat?
5. Bidang usaha apa saja yang diberikan oleh UED-SP dari PPD untuk masyarakat?
6. Apakah ada kendala yang dialami oleh UED-SP dari PPD dalam mengembangkan ekonomi masyarakat?
7. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh UED-SP dari PPD dalam mengembangkan ekonomi masyarakat?
8. Apa saja faktor pendorong dan penghambat pada UED-SP dari PPD dalam mengembangkan ekonomi masyarakat?
9. Bagaimana Strategi UED-SP dari PPD dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Desa Padang Sawah?
10. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Padang Sawah sebelum dan sesudah adanya UED-SP dari PPD?
11. Berapakah jumlah pinjaman yang paling besar dan yang paling kecil yang diberikan oleh UED-SP dari PPD kepada masyarakat?
12. Apakah masyarakat yang memperoleh pinjaman memakai agunan/jaminan?
13. Berapalamakah jangka waktu pinjaman yang diberikan oleh UED-SP dari PPD kepada masyarakat?
14. Berapa persenkah bunga pinjaman yang diberikan oleh UED-SP dari PPD kepada masyarakat yang memperoleh pinjaman?

B. Untuk masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa (PPD)

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I mengalami kesulitan dalam mengajukan pinjaman kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa?
2. Apa sajakah persyaratan untuk mengajukan pinjaman kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa?
3. Apa kemudahan yang Bapak/Ibu/Saudara/I dapat dari pinjaman tersebut?
4. Berapakah besarnya suku bunga yang di berikan oleh UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa Kepada Bapak/Ibu/Saudara/I?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/I tentang UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa?

RIWAYAT HIDUP



TAIYIMAH, lahir di Kuntu 26 Juni 1987, yaitu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar - Riau. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dengan nama Ayah Ahmad Ridwan dan nama Ibu Awani. Pendidikan yang penulis lalui adalah menamatkan SD Negeri 045 Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar pada Tahun 2000, kemudian melanjutkan ke sekolah lanjutan pertama di Madrasah Tsanawiyah Kuntu Toeroba (MTs.S) yang selesai pada Tahun 2003 dan Tingkat Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru (MAN-1) selesai pada Tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2006, dan Alhamdulillah penulis lulus di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tepatnya pada jurusan Ekonomi Islam pada tahun 2010.